

Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Tax Avoidance Dipengaruhi Oleh Konservatisme Akuntansi

Salwa Nazfa Syahrida¹ Restu Agusti²

Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: salwa.nazfa0133@student.unri.ac.id

Corresponding Author, email: restu1965@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi, sales growth, gender diversity dan karakteristik eksekutif dewan pada tax avoidance. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019 dengan total sampel adalah sebanyak 15 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan sales growth, gender diversity, dan karakteristik eksekutif dewan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

Kata Kunci: *Konservatisme Akuntansi, Sales Growth, Gender Diversity, Karakteristik Eksekutif Dewan, Tax Avoidance*

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of accounting conservatism, sales growth, gender diversity and board executive characteristics on tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2016-2019 period with a total sample of 15 companies selected based on predetermined criteria. By using multiple linear regression analysis method, the results of the study show that accounting conservatism has impact on tax avoidance. Meanwhile, sales growth, gender diversity, and board executive characteristics don't have impact on tax avoidance.

Key words: *conservatism, sales growth, gender diversity and executive characteristic on tax avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan sebuah negara yang taksirannya sangat besar dan digunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan data dari website resmi Kementerian Keuangan, bahwa jumlah pendapatan negara adalah sebesar Rp2.233,2 T dan sebesar Rp 1.865,7 T dana APBN tahun 2020 berasal dari penerimaan pajak, selebihnya berasal dari pendapatan bukan pajak sebesar Rp 367,0 T dan hibah sebesar Rp 0,5 T. Kemudian, [1] jumlah penerimaan pajak rata-rata setiap tahunnya adalah 70% dari total APBN. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak member peran yang sangat krusial bagi pemasukan negara. Dengan kata lain, apabila penerimaan pajak berkurang maka akan berimbas pada pemasukan negara, sehingga pembangunan sarana dan fasilitas tidak berjalan dengan maksimal serta kesejahteraan

masayarakat tidak merata. Oleh karena itu, negara membentuk peraturan mengenai undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan negara dari pajak sebanyak-banyaknya (www.pajak.go.id).

Di Indonesia, peraturan perundang – undangan mengenai penghindaran pajak belum diatur secara tegas, sehingga masih banyak wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak demi keuntungan perusahaannya. Secara hukum, dapat dikatakan bahwa melakukan penghindaran pajak adalah aktivitas yang bersifat legal karena perusahaan memanfaatkan kelemahan – kelemahan dalam peraturan perundang – undangan perihal perpajakan. Hanya saja penghindaran pajak sering kali mendapat sorotan negative dari instansi pajak. Oleh karenanya, tidak perlu heran jikalau masih sering menemui adanya berita mengenai aktivitas menghindari pajak yang dijalankan oleh perusahaan/lembaga, baik itu perusahaan yang ada di domestik maupun di mancanegara.

Mengenai fenomena penghindaran pajak, sebesar Rp 1.069,98 T tercatat sebagai realisasi pendapatan pajak yang dicatat pemerintah hingga akhir tahun 2020. Angka tersebut tidak mencapai tujuan yang ditentukan PP (Peraturan Presiden) Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yakni sejumlah Rp 1.198,82 T. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perolehan pajak mengalami pelemahan atau penurunan sejumlah 19,71 persen. Penurunan itu tidak lebih dari pelannya perekonomian tanah air dan transaksi perdagangan internasional diakibatkan pandemi Covid-19 dilansir dari (Bisnis Tempo, diakses pada 10 Januari 2022). Kemudian Tax Justice Network menyatakan, ditemukannya kerugian sebesar Rp 68,7 T atas penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia per tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan US\$ 4,86 M per tahun. Kemudian, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyatakan kecurigaannya pada sebuah tren perusahaan yang melaporkan kerugian dengan tindakan untuk mangkir pajak. Jumlah wajib pajak badan mengatakan kerugian bertambah dari 8% pada 2012 menjadi 11% di 2019. Kecurigaan bertambah dengan adanya laporan kerugian sebuah perusahaan selama bertahun-tahun dengan upaya melakukan penghindaran pajak, namun masih beroperasi hingga sekarang bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia. Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi satu tahun belakangan ini terjadi pada perusahaan pertambangan, yakni penunggakan pajak perusahaan yang sudah terjadi beberapa tahun lalu hingga tahun 2020 (suara.com, diakses 8 Desember 2021). Laode, Eks Pimpinan KPK menyatakan bahwa masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum dibayar oleh perusahaan tersebut hingga tahun sekarang.

Hal lain yang dapat menjadi alasan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah konservatisme akuntansi. Menurut FASB Statement of Concept No.2, konservatisme akuntansi adalah sikap waspada terhadap ketidakpastian dan akibat dari kondisi bisnis yang dipertimbangkan di masa depan. Faktor penentu tingkat konservatisme akuntansi laporan keuangan suatu perusahaan adalah sikap waspada yang berdampak pada komitmen manajemen untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan [2]. Semakin banyak perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya dengan mengurangi laba, maka pajak yang dikenakan juga semakin kecil.[1]

Sales growth atau pertumbuhan penjualan adalah kerangka yang mengukur kenaikan jumlah penjualan yang menunjukkan perkembangan penjualan suatu company dari masa ke masa. Makin baik laba yang diperoleh oleh suatu company, maka akan semakin besar beban pajak yang ditanggung. Hal ini akan memicu seorang wajib pajak ingin melakukan *tax avoidance*.

Gender diversity atau perbedaan gender dapat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Perbedaan karakter tersebut dapat pula dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan di suatu perusahaan. [3] berpendapat rasionalitas dalam membuat keputusan dan transparansi laporan keuangan akan lebih baik jika dilakukan oleh direksi wanita dibandingkan

dengan laki-laki. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat [4] bahwa direktur wanita cenderung melakukan yang terbaik dalam sebuah perusahaan dikarenakan dapat menyeimbangkan perilaku bertanggung jawab, baik itu di dalam perusahaan, pemegang saham, maupun di masyarakat.

Eksekutif dewan adalah seseorang yang ada di posisi yang sangat utama di sebuah perusahaan sebab otoritas dan kekuasaan terpuncak yang mereka miliki untuk mengatur operasional perusahaannya. Semakin berani eksekutif perusahaan mengambil risiko, semakin besar penghindaran pajak yang akan dilakukan. Di sisi lain, eksekutif perusahaan yang cenderung menghindari risiko lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak di perusahaannya [5].

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan adalah suatu kontrak dimana yang memiliki perusahaan memberi perintah terhadap manajer ketika memilih keputusan yang tepat bagi pemilik perusahaan. Karena dianggap sebagai profesional yang lebih berpengalaman dalam menjalankan bisnis dan dapat mencapai tujuan perusahaan, seorang agen dipercaya untuk mengelola atau menjalankan manajemen perusahaan [6].

2.2 Teori Kontrak Sosial

Dalam [7] dijelaskan, menurut ilmuwan terdahulu, Rousseau (1762), teori kontrak social dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan jika raja memerintah dengan adil maka rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepadanya. Kontrak social pemerintah dan warga negara dalam hal perpajakan mengandung unsure kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah pemerintah yang mempercayai warga negaranya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Sementara itu, tindakan mempercayai pemerintah mengelola pajak hingga membuat wajib pajak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya merupakan kepercayaan dari warga negara. Ketaatan pada kesepakatan sebagaimana dipaparkan di teori ini akan membuat wajib pajak untuk bersikap sama yaitu memenuhi kewajiban pajaknya.

2.3 Tax Avoidance

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak supaya tidak menyetor pajaknya atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan kekurangan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku. [8]. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat disebabkan oleh sistem pembayaran pajak yang dinilai sendiri. Wajib pajak badan sangat pandai menggunakan sistem self-assessment yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola pajaknya, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan lebih sedikit atau bahkan perusahaan tak membayar pajak sama sekali. Selain itu, adanya faktor-faktor lain penyebab terjadinya mangkir pajak, seperti tarif pajak yang sangat besar, peraturan perundang-undangan yang tidak secara gamblang menjelaskan mengenai penghindaran pajak, serta sanksi yang tidak memiliki efek jera kepada wajib pajak yang menyalahi aturan.

2.4 Konservatisme Akuntansi

[9] menyatakan sebuah prinsip akuntansi yang berarah pada meminimalisir laba kumulatif yang diberikan, yaitu dengan pengakuan penerimaan yang lebih pelan, pengakuan beban yang lebih cepat, penilaian asset dengan nilai paling rendah dan penilaian kewajiban dengan nilai lebih tinggi disebut konservatisme akuntansi. Selain itu [10] menyatakan bahwa konservatisme adalah metode yang memungkinkan untuk mengenali biaya dan kerugian lebih cepat tanpa menunggu bukti nyata di peroleh, tetapi persepsi ini cenderung menunda pengakuan pendapatan atau keuntungan perusahaan. Konservatisme akuntansi dilakukan dalam perusahaan

dalam tingkatan yang tidak sama. Salah satu faktor yang menjamin tingkatan konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah tanggung jawab pihak manajemen dan pihak internal perusahaan dalam menyediakan informasi yang koherensif, akurat dan tak menyesatkan bagi investornya[1]

H₁= Konservatisme akuntansi berdampak terhadap penghindaran pajak.

2.5 Sales Growth

Tumbuh kembang penjualan juga adalah salah satu rasio pertumbuhan yang bermanfaat sebagai pengukuran kinerja penjualan suatu perusahaan [11]. Dengan adanya nilai pertumbuhan penjualan dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan dalam menentukan peningkatan penjualan dari tahun ketahun. Selain itu, pertumbuhan penjualan dapat juga digunakan sebagai prediksi perolehan laba perusahaan, apakah meningkat atau menurun. Perusahaan yang terdapat peningkatan biasanya akan mengambil tindakan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar kepada negara [1].

H₂= Sales growth berdampak terhadap penghindaran pajak.

2.6 Gender Diversity

Keragaman struktur dari eksekutif berkaitan dengan individu yang melibatkan perbedaan antara ras, *gender*, umur dan etnis disebut *gender diversity*. Dalam bukunya, [12] menyatakan umumnya, pria dan wanita mempunyai perbedaan yang besar pada dalam jenjang karirnya. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan dan menerima kompensasi. Pada susunan eksekutif skala perbandingan pria dan wanita berpengaruh terhadap pengambilan keputusan suatu perusahaan. Oleh sebabnya, adanya wanita di sebuah direksi merupakan suatu urgensi karena mempunyai peran yang efektif dalam mengontrol kinerja manajer

H₃= Gender diversity berdampak terhadap penghindaran pajak.

2.7 Karakteristik Eksekutif Dewan

Eksekutif yaitu seseorang yang menempati posisi penting dalam sebuah pimpinan disuatu perusahaan atau suatu organisasi. Organisasi dipegang oleh suatu hierarki manajer, yakni dengan chief executive officer (CEO) yang berada di posisi puncak, yang mana para pemimpin memiliki kualitas dan gaya kepemimpinan masing-masing dalam mengambil keputusan. Pemimpin bias saja dari seorang yang berani terhadap risk, atau seseorang yang tidak berani terhadap resiko. Menurut [13] dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif mempunyai dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Semakin tinggi nilai sifat *risk taker* eksekutif, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₄= Karakter eksekutif dewan berdampak terhadap pemangkiran pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pengukuran Variabel

3.1.1 Tax Avoidance

Tax avoidance diukur dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif Pajak Efektif diukur dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

Ket:

ETR: *Effective Tax Rate* / Rasio Efektivitas Pajak

3.1.2 Konservatisme Akuntansi

Berdasarkan penelitian [14] dalam buku karangan Savitri (2016:45), menggambarkan rumus konservatisme akuntansi yaitu :

$$\text{Market to Book} = \frac{\text{harga pasar per saham}}{\text{nilai buku per saham}} \quad (2)$$

3.1.3 Sales Growth

[15] menjelaskan rumus perhitungan pertumbuhan penjualan, yakni:

$$\text{NSGR} = \frac{\text{Net } S_t - \text{Net } S_{t-1}}{\text{Net } S_{t-1}} \times 100 \quad (3)$$

Ket:

NSGR: *Net Sales Growth Ratio* / Rasio Pertumbuhan Penjualan Bersih

3.1.4 Gender Diversity

Bentuk pengukurannya adalah variabel dummy. Bernilai 1 apabila terdapat wanita dalam direksi dan 0 jika tidak.

3.1.5 Karakteristik Eksekutif Dewan

Pada penelitian ini, indikator pengukuran karakteristik eksekutif :

$$\text{RISK} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{total aset}} \quad (4)$$

Ket:

EBITDA: *Earning Before Interest, Tax, D and Allowances*

3.2 Analisis Data

Dengan bantuan program SPSS, penelitian ini menganalisis data berupa statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis linear berganda dan uji t.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Adapun hasil uji analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1: Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Konservatisme Akuntansi	4	.19	6.71	1.8605	1.65798
<i>Sales growth</i>	4	-.32	.97	.1010	.25975
<i>Gender diversity</i>	4	.00	1.00	.3889	.49208
Karakter Eksekutif	4	.00	1.00	.2407	.43155
<i>Tax avoidance</i>	4	.00	.59	.2763	.11300

Valid (listwise)	N	4
---------------------	---	---

Sumber: data olahan SPSS 26.0, 2022

Berdasarkan data pada tabel 5.1, variabel konservatisme akuntansi sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 0.19 (19%) dan nilai maksimum sebesar 6.71 (671%). Serta nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 1.8605 dan 1.65798 yang berarti nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* sudah merata dan memiliki penyimpangan yang rendah atau bahkan tidak memiliki penyimpangan.

Adapun hasil uji normalitas data adalah seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2: Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.0966416 5
Most Differences	Extreme	Absolute	.098
		Positive	.064
		Negative	-.098
Test Statistic			.098
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Asymp Significance adalah 0.,200. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal.

**Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas
coefficients^a**

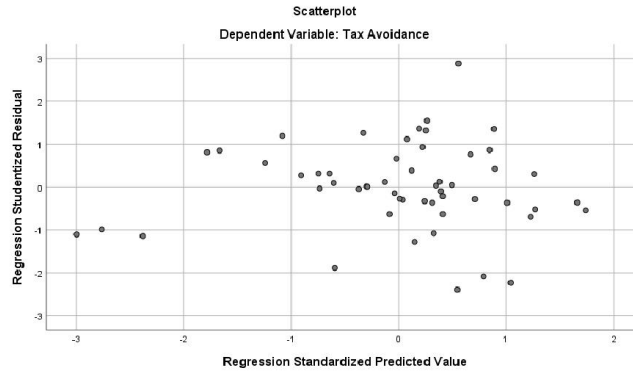
Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
(constant)	.304	.026	1.580	.000		

Konservatisme Akuntansi	-.031	.009	-.461	3.581	.001	.901	1.110
<i>Sales growth</i>	.058	.054	.134	.074	.288	.960	1.041
<i>Gender diversity</i>	.042	.029	.181	.421	.162	.921	1.086
Karakter Eksekutif	.036	.033	.136	.078	.286	.942	1.061

Sumber data: olahan SPSS 26.0, 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Pada variabel konservatisme akuntansi memiliki nilai *tolerance* 0,901 dan nilai VIF sebesar 1,110. Variabel *sales growth* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,960 dan nilai VIF 1,041. Variabel *gender diversity* memiliki nilai *tolerance* dan VIF masing-masing sebesar 0,921 dan 1,086. Variabel karakter eksekutif memiliki nilai *tolerance* 0,942 dan nilai VIF 1,061. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa keempat variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas - Scatterplot



Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi - Durbin Watson

Durbin Watson
1.318

Hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,304 + (-0,031) X1 + 0,058 X2 + 0,042 X3 + 0,036 X4 + e$$

Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.518 ^a	.269	.209	.209	.10051

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,209. Hal ini berarti bahwa pengaruh masing-masing variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen adalah sebesar 20,9%.

Tabel 6: Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.304	.026		11.580	.000
	Konservatisme Akuntansi	-.031	.009	-.461	-3.581	.001
	<i>Sales growth</i>	.058	.054	.134	1.074	.288
	<i>Gender diversity</i>	.042	.029	.181	1.421	.162
	Karakter Eksekutif	.036	.033	.136	1.078	.286

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil daripada penelitian ini ditunjukkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki dampak pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya prinsip konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan maka kecil kemungkinan *tax avoidance* terjadi. Sementara itu, *sales growth*, *gender diversity* dan karakteristik eksekutif dewan tak berdampak terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini harus melakukan *outlier* terlebih dahulu dalam mengolah data agar data dapat berdistribusi normal.

5.3 Saran

Saran dari penelitian ini adalah perusahaan harus menerapkan prinsip konservatisme akuntansi untuk meminimalkan terjadinya tindakan *tax avoidance* dan pemerintah seharusnya lebih menegaskan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai *tax avoidance* agar perusahaan-perusahaan tetap membayar pajak yang sesuai agar dapat menambah pemasukan/kas negara.

Daftar Pustaka

- [1] V. F. Anjali, "PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE," 2021.
- [2] R. I. Hartoto, "Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)," 2018.
- [3] M. Hoseini, G. . Safari, dan H. Valiyan, "Demographic Charateristics of The Board of Directors' Structure and Tax Avoidance: Evidence fro Tehran Stock Exchange," *Int. J. Soc. Econ.*, vol. 46, no. 2, hal. 199–212, 2019.
- [4] B. Hudha dan D. C. Utomo, "PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI

EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017),” *Diponegoro J. Account.*, vol. 10, no. 1, hal. 1–10, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/9>.

- [5] K. Ardillah dan A. P. C, “Executive Compensation , Executive Character , Audit Committee , and Audit Quality on Tax Avoidance,” *Akuntabilitas J. Ilmu Akunt.*, vol. 14, no. 2, hal. 169–186, 2021, doi: 10.15408/akt.v14i1.22114.
- [6] R. Khairandy dan C. Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- [7] I. Ruslan, “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama,” *Al-Adyan*, vol. VIII, no. 2, hal. 17–36, 2013.
- [8] N. Lismiyati dan Y. Herliansyah, “THE EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM , CAPITAL INTENSITY AND INDEPENDENT COMMISSIONERSON TAX AVOIDANCE , WITH INDEPENDENT COMMISSIONERS AS MODERATING VARIABLES (EMPIRICAL STUDY ON BANKING COMPANIES ON THE IDX 2014-2017),” *DIJEFA (Dinasti Int. J. Econ. Financ. Accounting)*, vol. 2, no. 1, hal. 55–76, 2021, doi: <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i1>.
- [9] V. Jumailah, “Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi,” vol. 3, no. 1, hal. 13–21, 2020.
- [10] N. Sundari dan V. Aprilina, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance,” *JRAK J. Ris. Akunt. dan Komputerisasi Akunt.*, vol. 8, no. 1, hal. 85–109, 2017, doi: 10.33558/jrak.v8i1.861.
- [11] A. D. Haryanti, “Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” *Ekon. Keuangan, Investasi dan Syariah*, vol. 3, no. 2, hal. 163–168, 2021, doi: 10.47065/ekuitas.v3i2.1106.
- [12] L. Wirth, *Breaking Through the Glass Ceiling: Women in Management*, 1 ed. Geneva: International Labour Office, 2001.
- [13] A. Low, “Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compesation,” *J. financ. econ.*, vol. 92, hal. 470–490, 2009, doi: 10.106/j.jfineco.2008.05.004.
- [14] W. H. Beaver dan S. G. Ryan, “Biases and Lags in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book-to-Market Ratio to Predict Book Return on Equity,” *J. Account. Res.*, vol. 38, no. 1, hal. 127–148, 2000, doi: 10.2307/2672925.
- [15] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet.9. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.